



PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Bagi 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Riau & Kepulauan Riau

Batam, 5-7 Juli 2019



SUNARTO

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Non Yudisial



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 794 /M AA.05/2018 31 Desember 2018
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018

Yth. Ketua Mahkamah Agung ✓
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperoleh nilai 69,10 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Mahkamah Agung sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2017	2018
a. Perencanaan Kinerja	30	21,35	21,94
b. Pengukuran Kinerja	25	16,29	16,72
c. Pelaporan Kinerja	15	11,00	11,00
d. Evaluasi Internal	10	6,03	7,28
e. Capaian Kinerja	20	10,03	12,16
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,70	69,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2018



DASAR HUKUM

01

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
3. PERMENPAN RB NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI SAKIP



02

GOAL

TUJUAN

UNTUK MENILAI TINGKAT AKUNTABILITAS ATAU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HASIL (*OUTCOME*) TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL (*RESULT ORIENTED GOVERNMENT*)



HASIL EVALUASI SAKIP

03

- Excellent
- Good
- Satisfactory
- Poor

HASIL

- ✓ MAHKAMAH AGUNG MEMPEROLEH **NILAI 69,10** DARI SKALA **100** ATAU **PREDIKAT "B"**.
- ✓ PENILAIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJANYA, KUALITAS PEMBANGUNAN BUDAYA KINERJA BIROKRASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA HASIL DI MAHKAMAH AGUNG SUDAH MENUNJUKKAN **HASIL YANG BAIK**.



PERBANDINGAN PENILAIAN SAKIP MA 2017 DAN 2018

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2017	NILAI 2018	KETERANGAN NAIK/TURUN
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	21,35	21,94	↑ NAIK : 0,59
B.	PENGUKURAN KINERJA	25	16,29	16,72	↑ NAIK : 0,43
C.	PELAPORAN KINERJA	15	11,00	11,00	= SAMA
D.	EVALUASI INTERNAL	10	6,03	7,28	↑ NAIK : 1,25
E.	CAPAIAN KINERJA	20	10,03	12,16	↑ NAIK : 2,13
	NILAI HASIL EVALUASI	100	64,70	69,10	↑ NAIK : 4,4
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		B	B	

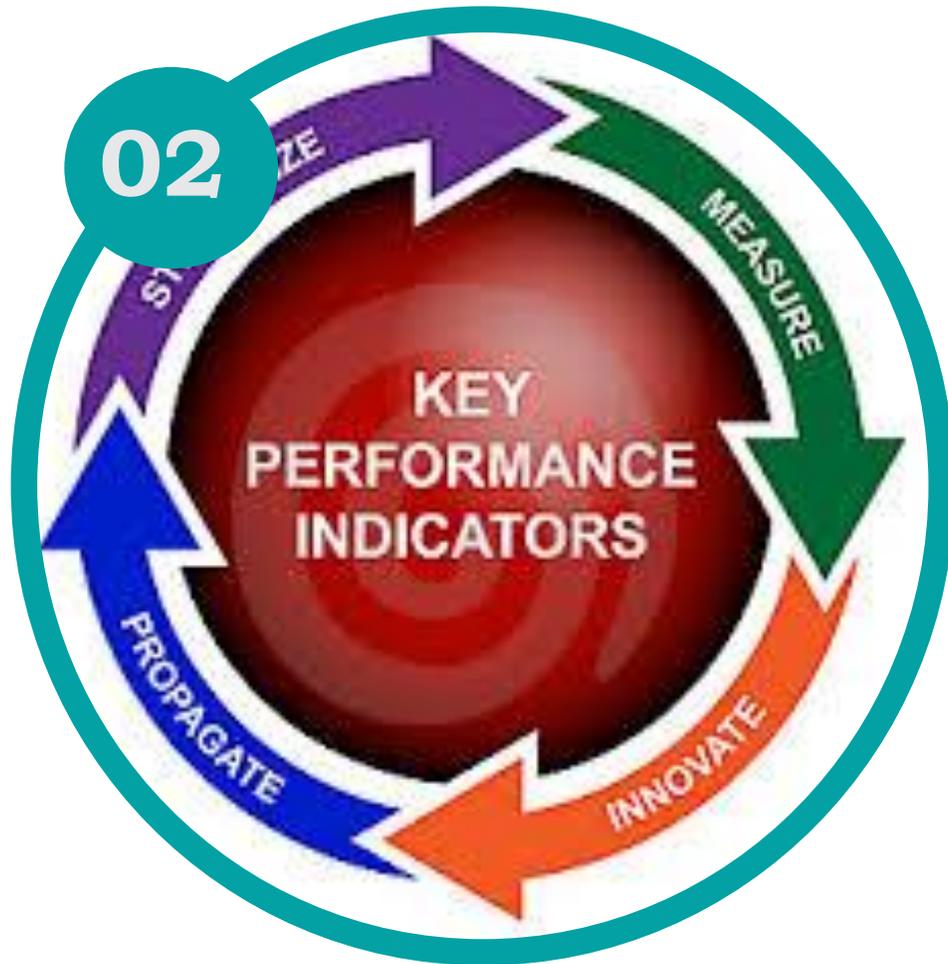


IMPLEMENTASI SAKIP MA CUKUP BAIK

01

HAL INI TERCERMIN DARI TUJUAN DAN SASARAN DI LEVEL **MAHKAMAH AGUNG** DAN **UNIT ESELON I** YANG TELAH:

- ✓ BERORIENTASI HASIL (*OUTCOME*)
- ✓ ADANYA *CASCADE* INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SECARA BERJENJANG MULAI TINGKAT **MAHKAMAH AGUNG** SAMPAI PADA **PENGADILAN TINGKAT BANDING** DAN **TINGKAT PERTAMA**



MA TELAH MELAKUKAN REVIU IKU

REVIU IKU TERSEBUT DIGUNAKAN
DALAM :

- ✓ PERENCANAAN
- ✓ PENGANGGARAN
- ✓ PENGUKURAN
- ✓ PELAPORAN, DAN
- ✓ EVALUASI INTERNAL



MA TELAH MELAKUKAN KETERBUKAAN INFORMASI

03



- ✓ KETERBUKAAN INFORMASI DILAKUKAN MELALUI *WEBSITE* MILIK MA DAN UNIT KERJA DI BAWAHNYA.
- ✓ DALAM *WEBSITE* TERSEBUT TERDAPAT MENU KHUSUS BERUPA SAKIP YANG ISINYA TENTANG :
 - RENSTRA
 - PERJANJIAN KINERJA
 - INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN
 - LAPORAN KINERJA



TUJUH

HAL YANG

PERLU

DIPERHATIKAN

UNTUK

PENINGKATAN

AKIP



PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP

01



RENCANA STRATEGIS

PADA RENSTRA UNIT ORGANISASI ESELON I **BELUM SEPENUHNYA** BERORIENTASI HASIL (*OUTCOME*) **DAN BELUM SEPENUHNYA** DILENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA ATAS TUJUAN YANG DITETAPKAN

02



PERJANJIAN KINERJA

TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG **NAMUN BELUM MENYELURUH** HINGGA TINGKAT UNIT KERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, **DAN BELUM** DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (SKP)



PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP

03



MONEV

PENGUKURAN KINERJA

TELAH DILAKUKAN SECARA BERKALA MELALUI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN, **AKAN TETAPI BELUM** BERFOKUS PADA *OUTPUT* KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN

04



SISTEM INFORMASI
PELUSURAN PERKARA

SIPP BELUM TERINTEGRASI DENGAN SAKIP

MA **TELAH** MEMILIKI SIPP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT DATA DAN INFORMASI TENTANG KINERJA PENANGANAN PERKARA DARI TINGKAT PERTAMA HINGGA BANDING, **NAMUN** SISTEM INI BELUM TERINTEGRASI DENGAN SAKIP



PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP



LAPORAN KINERJA

- ✓ LAPORAN KINERJA DI TINGKAT UNIT KERJA **TELAH MENYAJIKAN**:
 - ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
 - PERBANDINGAN DATA KINERJA TAHUN BERJALAN DAN SEBELUMNYA
- ✓ **NAMUN BELUM MENYAJIKAN** ANALISIS YANG MENDALAM MENGENAI :
 - KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
 - SEHINGGA BELUM OPTIMAL DIGUNAKAN UNTUK UMPAN BALIK PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN



KUALITAS EVALUASI PROGRAM

- ✓ **MASIH** BERFOKUS PADA :
 - CAPAIAN OUTPUT DAN
 - PENYERAPAN ANGGARAN,
- ✓ **DAN BELUM FOKUS** PADA :
 - ANALISIS KETERKAITAN KAUSALITAS ANTARA KEGIATAN-KEGIATAN DENGAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA, DAN
 - SASARAN PROGRAM YANG AKAN DICAPAI OLEH ORGANISASI



TINGKATKAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWASAN **PERLU DITINGKATKAN**, HAL INI TERKAIT MASIH ADANYA REKOMENDASI-REKOMENDASI YANG **BELUM DITINDAKLANJUTI** OLEH UNIT-UNIT KERJA.



DELAPAN REKOMENDASI MENPAN RB

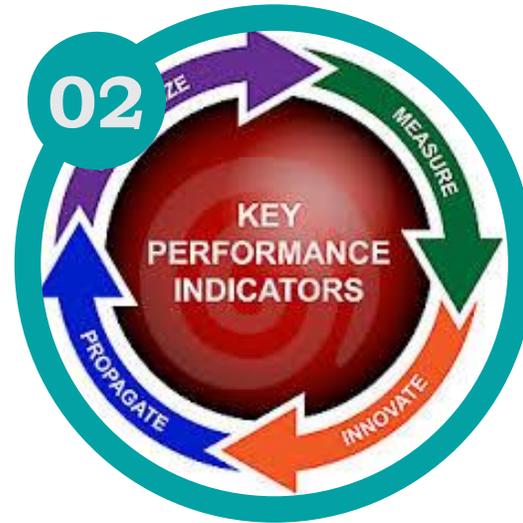


8 REKOMENDASI MENPAN RB



PENYEMPURNAAN RENSTRA

PERLU MELAKUKAN PENYEMPURNAAN RENSTRA PADA UNIT ESELON I AGAR LEBIH BERORIENTASI PADA OUTCOME DAN ADANYA INDIKATOR TUJUAN



PEMANFAATAN IKU DALAM SAKIP

PERLU MEMASTIKAN DIMANFAATKANNYA IKU DALAM INSTRUMEN SAKIP PADA SELURUH UNIT MAHKAMAH AGUNG



TINGKATKAN KUALITAS KINERJA

MENINGKATKAN KUALITAS PENGUKURAN KINERJA SECARA BERKALA YANG LEBIH FOKUS KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN SECARA BERJENJANG



INTEGRASI SIPP DENGAN SAKIP

MELAKUKAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DENGAN SAKIP



8 REKOMENDASI MENPAN RB



05

TINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KINERJA

**MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN
KINERJA PADA UNIT
KERJA DAN
MEMANFAATKANNYA
UNTUK UMPAN BALIK
PERBAIKAN SECARA
BERKELANJUTAN**



06

TINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PROGRAM

**MENINGKATKAN
KUALITAS EVALUASI
PROGRAM YANG
FOKUS PADA
ANALISIS CAPAIAN
KINERJA DAN
KETERKAITAN
KAUSALITAS
KEGIATAN DAN
PROGRAM**



07

TINDAK LANJUTI HASIL EVALUASI BAWAS

**MENDORONG UNIT KERJA
UNTUK
MENINDAKLANJUTI HASIL
EVALUASI
AKUNTABILITAS YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN
PENGAWASAN**



08

DORONG PENINGKATAN KUALITAS SAKIP

**TERUS MENDORONG
UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS PENERAPAN
SAKIP DI SELURUH UNIT
KERJA MELALUI
EVALUASI MAUPUN
BIMBINGAN TEKNIS
AKUNTABILITAS KINERJA**



KEPATUHAN LHKPN PER 26/06/2019 90,72%

Sumber: <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>

INSTANSI	WAJIB LAPOR	PN/WL ONLINE	PN/WL OFFLINE	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	KEPATUHAN (%)
MAHKAMAH AGUNG	20.117	18.681	1.436	18.250	1.867	15.554	2.696	90.72%

- PENYELENGGARA NEGARA YANG TELAH PINDAH TUGAS DARI PENGADILAN A (LAMA) KE PENGADILAN B (BARU), NAMANYA TERTULIS PADA KEDUA PENGADILAN TERSEBUT, SEHINGGA PERSENTASE KEPATUHAN MENJADI RENDAH.



MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENGHARGAAN BNN

atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI pada hari Rabu, 26 Juni 2019.



*“Intelektualitas tanpa integritas
Bagai pelita di tangan pencuri
Integritas tanpa intelektualitas
Bagai pelita di tangan bayi,”*

TERIMA KASIH

SUNARTO

Batam, 5-7 Juli 2019